

## DAFTAR REFERENSI

- Andi Hamzah, 1991, Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya, PT. Gramedia Pustaka UTama, Jakarta, hlm. 7
- Anggraini Novita. (2017). Faktor yang Menyebabkan Opini Auditor atas Laporan Keuangan Wajar Dengan Pengecualian. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol 6(2).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2015). *PMK Nomor 177/PMK.05/2015 Pasal 2 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020*
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2021*
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2022*
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2023*
- Basuki, Dirvi Surya. Ketepatan Pemberian Opini Audit oleh Akuntans Publik dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi: Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di Banten. *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol 4(2)
- Direktori Putusan Mahkamah Agung. (2023). *Putusan Pengadilan Anang Achmad Latif dengan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2023/PM.Jkt.Pst*
- Direktori Putusan Mahkamah Agung. (2024). *Putusan Pengadilan Achsanul Qosasi dengan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst*
- Direktori Putusan Mahkamah Agung. (2024). *Putusan Pengadilan Johnny Gerard Plate dengan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI*
- Direktori Putusan Mahkamah Agung. (2024). *Putusan Pengadilan Johnny Gerard Plate dengan Nomor 3448 K/Pid.Sus/2024*
- Halim Abdul, Yuda Pamungkas. Evaluasi atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga yang Memperoleh Opini Tidak Menyatakan Pendapat pada Tahun 2016. *Jurnal Akuntansi*
- Hamdani. (2024). *Pengauditan Keuangan Negara*. Penerbit Rajawali Pers,

- Haryadi Eko S. (2015). Analisis Pengungkapan (*Disclosure*) Laporan
- Haryatmoko. (2011). *Etika Publik: Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Gramedia Pustaka Utama
- Keuangan Kabupaten yang Meraih Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dua Tahun Berturut-turut. *Jurnal Akuntansi*. Vol 3(2) 184-195.
- Hoesada, J. (2022). Teori Akuntansi dalam Hampiran Historiografis Taksonomis (1 ed.). Penerbit ANDI.
- Indrawati, Sri Mulyani. (2024). <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita> yang diakses tanggal 24 September 2024
- Juknis Pelaksanaan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1006/KMK.05/2006 tentang perubahan nama BP3TI menjadi BAKTI*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2006). *Keputusan Menkominfo Nomor 1006/KMK.05/2006 tentang Penetapan BAKTI pada Departemen Komunikasi dan Informatika*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika*.
- Lexy, J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014. hlm. 6
- Nicodeus Arnold. (2015). Kajian Hukum Atas Opini BPK RI Terhadap Laporan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Edisi 2025
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan Edisi 2025
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 14 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Edisi 2025
- Puspitasari Ayu, Muhammad Aidil. (2020). Opini Audit atas Pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi*. Vol 18(1) 69-83.

Raditya Silky. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Opini Auditor atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Accounting Analysis Journal*. Vol 1(2).

Raharja Ivan F, Hafrida. (2017). Analisis Yuridis Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. Vol 1(2).

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*.

Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika*.

Rosidawati, Sri Mulyani. (2013). Studi: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang Memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (Menggunakan *Content Analysis*). *Jurnal Akuntansi*.

Sandu, Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Cetakan 1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015. hlm. 27

Setiyanti Sri Wiranti. (2012). Jenis-jenis Pendapat Auditor (Opini Auditor). *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 4(2).

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretatif, interaktif dan Konstruktif*. Alfabeta

Suryo Handoko P, Julius Ary M. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Opini Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Papua pada Lima Wilayah Adat Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol VII(1).

Susanti. (2022). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Sebagai Kriteria Perumusan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

*Jurnal Tesis.*

- Wibawati Norma. (2014). Analisis Dampak Publikasi Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-PP) dan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Terhadap *Abnormal Return Saham*. Naskah Publikasi.
- Widodo Oka Purnawan, Sudarno. (2017). Pengaruh Temuan Kelemahan System Pengendalian Intern Dan Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal akuntansi*. Vol. 6(1) 1-9.
- Yanti Rufaedah. (2020). Analisis Faktor-faktor Penghambat Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Akuntansi*. Vol 12(2).
- Yunawati Sri. (2022). Analisis Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. *Jurnal Akuntansi*. Vol 11(1).
- Yuswar Effendy, Widyaiswara. Kajian Hasil Pemeriksaan BPK Opini Wajar Tanpa Pengecualian Terhadap Laporan Keuangan Pemda. *Jurnal Akuntansi*
- Zifi Meliza P, Fifitri Ali. (2019). Pengaruh Opini Audit Sebelumnya Terhadap Opini BPK pada Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. Vol 12(2) 39-46.

